

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) merupakan media untuk menyampaikan informasi sampai sejauh mana instansi pemerintah, dalam hal ini Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan, melaksanakan rencana strategik dan memenuhi tuntutan perubahan yang ada di masyarakat.

---

#### **A. LATAR BELAKANG**

---

Latar belakang penyusunan Laporan Kinerja (LKIP) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2017 adalah adanya keinginan yang kuat dari Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan untuk mewujudkan Good governance, berlandaskan pada TAP MPR RI No.XI/MPR/1998 dan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Perwujudan Good governance ini diimplementasikan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan dalam tiga pilar tata pemerintahan yang baik yaitu akuntabilitas, partisipasi, dan transparansi.

---

#### **B. MAKSUD DAN TUJUAN**

---

Bagian akhir dari sistem AKIP adalah penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP). LKIP disusun pada akhir periode pelaksanaan program/kegiatan, dimana capaian kinerja dikomunikasikan kepada para stakeholders.

LKIP memiliki dua fungsi utama sekaligus. *Pertama*, LKIP merupakan sarana bagi SKPD untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh stakeholder yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian tujuan dan sasaran. *Kedua*, LKIP merupakan sarana evaluasi atas pencapaian kinerja SKPD sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja di masa yang akan datang atau dalam upaya peningkatan kinerja (*performance improvement*) organisasi, baik dalam bentuk regulasi, distribusi, maupun alokasi sumber daya yang dimiliki oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan

---

### **C. ASPEK STRATEGIS**

---

Uraikan aspek strategis yang menjadi bagian dari perwujudan visi bupati yang meliputi satu / beberapa tujuan strategis atau mungkin berupa hasil akhir (*ultimate outcome*) yang ingin diwujudkan pada akhir masa jabatan Kepala Dinas. Penentuan sebuah visi organisasi adalah pandangan tentang apa yang seharusnya dicapai oleh organisasi secara realistis, mempunyai daya tarik dan dapat menjadi pemandu untuk mencapai tujuan yang lebih baik.

Pemerintah Kabupaten Balangan telah menetapkan visinya untuk tahun 2016 s.d 2021 yaitu:

***"Terwujudnya Kabupaten Balangan yang maju dan sejahtera melalui pembangunan Sumber Daya Manusia".***

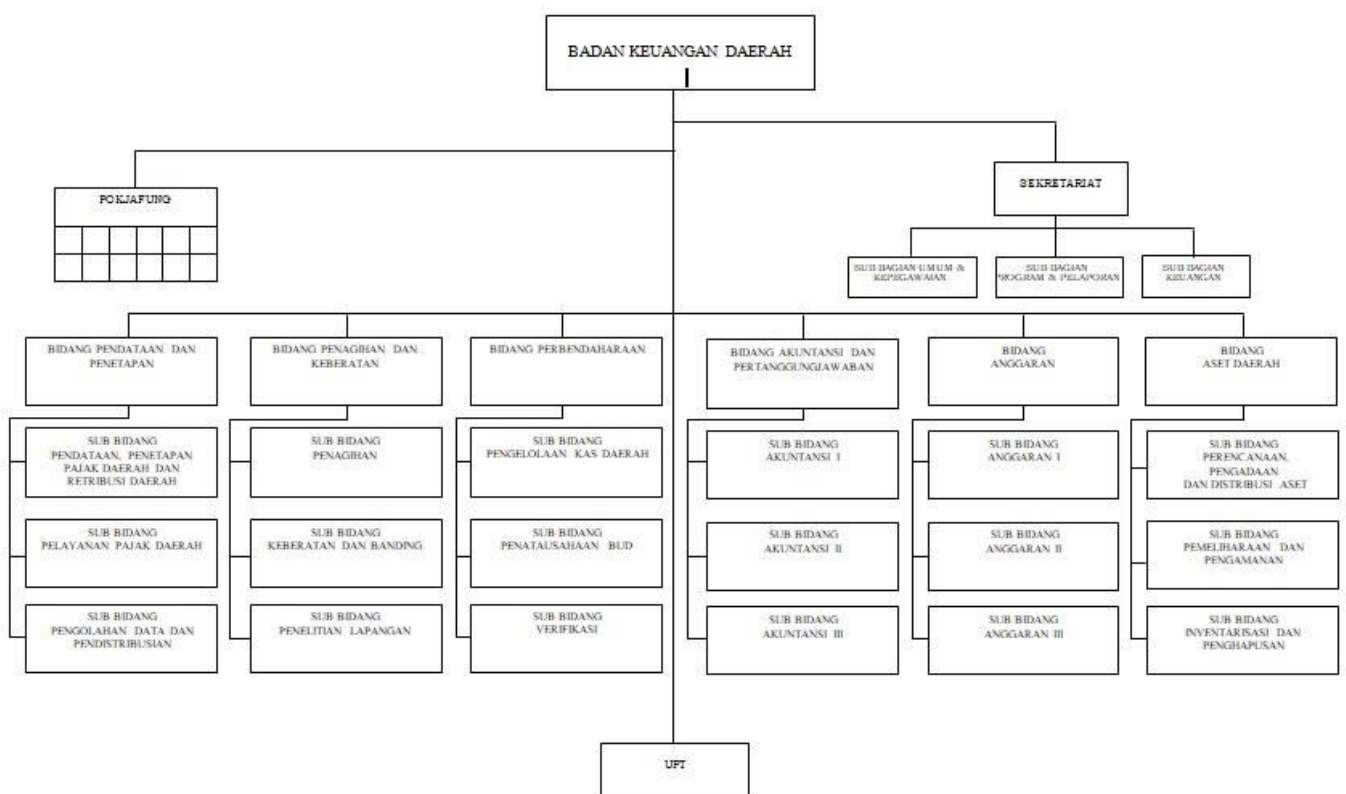
Untuk mewujudkan visi tersebut, maka perlu langkah-langkah konkrit pelaksanaan pembangunan daerah secara efektif dan efisien, maka langkah awal yang perlu didukung oleh masing-masing unit organisasi untuk menetapkan visi masing-masing. Untuk itu, visi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2016 s.d 2021 adalah:

***" Terwujudnya optimalisasi penerimaan daerah, pengelolaan keuangan dan aset daerah melalui pelayanan yang profesional".***

## D. KONDISI UMUM SKPD

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 22 tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 03 Tahun 2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Balangan. Maka susunan organisasi Badan Keuangan Daerah berubah strukturnya.

### 1. Organisasi dan Personalia Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan



Gambar 1. Struktur Organisasi Badan Keuangan Daerah Kab. Balangan

Susunan organisasi Badan Keuangan Daerah (BKD) terdiri dari :

1. Kepala Badan Keuangan Daerah.
2. Sekretaris membawahi 3 (tiga) Sub Bagian:
  - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
  - b. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
  - c. Sub Bagian Keuangan
3. Bidang Pendataan dan Penetapan 3(tiga) Subbid:
  - a. Sub bidang Pendataan, Penetapan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
  - b. Sub bidang Pelayanan Pajak Daerah.
  - c. Sub bidang Pengolahan Data dan Pendistribusian.
4. Bidang Penagihan dan Keberatan 3(tiga) Subbid:
  - a. Sub bidang Penagihan.
  - b. Sub bidang Keberatan dan Banding.
  - c. Sub bidang Penelitian Lapangan.
5. Bidang Perbendaharaan membawahi 3 (tiga) Subbid:
  - a. Sub bidang Pengelolaan Kas Daerah.
  - b. Sub bidang Penatausahaan BUD.
  - c. Sub bidang Verifikasi.
6. Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban membawahi 3 (tiga) Subbid:
  - a. Sub bidang Akuntansi I.
  - b. Sub bidang Akuntansi II.

- c. Sub bidang Akuntansi III.
- 7. Bidang Anggaran membawahi 3 (tiga) Subbid.
  - a. Sub bidang Anggaran I.
  - b. Sub bidang Anggaran II.
  - c. Sub bidang Anggaran III.
- 8. Bidang Aset Daerah membawahi 3 (tiga) Subbid.
  - a. Sub bidang Seksi Perencanaan, Pengadaan dan Distribusi Aset.
  - b. Sub bidang Pemeliharaan dan Pengamanan.
  - c. Sub bidang Inventarisasi dan Penghapusan.
- 9. UPT.

Badan Keuangan Daerah (BKD) mempunyai tugas melaksanakan urusan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan. Uraian tugas yang dimaksud diatas adalah sebagai berikut :

- a. mengoordinasikan, membina dan mengawasi perumusan kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan keberatan, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, anggaran dan aset daerah;
- b. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan;
- c. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang penagihan dan keberatan;

- d. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang perbendaharaan;
- e. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang akuntansi dan pertanggungjawaban;
- f. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang anggaran;
- g. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pelaksanaan kebijakan teknis bidang aset daerah;
- h. mengoordinasikan dan menyinkronisasikan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan keberatan, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, anggaran dan aset daerah;
- i. mengoordinasikan, membina dan mengawasi pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan teknis bidang pendataan dan penetapan, penagihan dan keberatan, perbendaharaan, akuntansi dan pertanggungjawaban, anggaran dan aset daerah; dan melaksanakan tugas lain sesuai bidang tugas dan kewenangannya.

Badan Keuangan Daerah (BKD) dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan kebijakan teknis pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;

- b. pelaksanaan tugas pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- d. pembinaan teknis penyelenggaraan pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset Daerah;
- e. pelaksanaan administrasi badan; dan pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## 2. Personalia

Jumlah pegawai Badan Keuangan Daerah pada tahun 2017 adalah sebanyak 56 orang PNS yang dapat dikelompokkan menurut golongan dan jenjang pendidikan sebagai berikut :

		Jumlah Dalam Satuan Orang				
Tingkat Pendidikan		Golongan				Jumlah
		I	II	III	IV	
1	SD	1	0	0	0	1
2	SMP	1	0	0	0	1
3	SMA	0	12	0	0	12
4	D - 1	0	0	0	0	0
5	D - 2	0	0	0	0	0
6	D - 3	0	9	0	0	9
7	D - 4 / S - 1	0	0	0	0	0
8	S - 1	0	0	24	5	29
9	S - 2	0	0	2	2	4
10	S - 3	0	0	0	0	0
<b>Jumlah</b>		<b>2</b>	<b>21</b>	<b>26</b>	<b>7</b>	<b>56</b>

Tabel 1. Jumlah Pegawai Badan Keuangan Daerah Kab. Balangan

## **E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP**

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah ini dilakukan dengan membentuk fokus grup, yang berperan mengevaluasi kembali unsur renstra atau menguraikan lebih lanjut rumusan tujuan dan sasaran Badan Keuangan Daerah Tahun 2016 – 2021 menjadi sasaran yang lengkap dengan indikator kinerjanya. Masing-masing kegiatan tahun 2017 yang sudah dilaksanakan oleh satuan kerja akan dikaitkan dengan sasaran yang hendak dicapai oleh Badan Keuangan Daerah.

Adapun sistematika penyusunan LKIP Badan Keuangan Daerah tahun 2017 adalah sebagai berikut :

### **IKHTISAR EKSEKUTIF**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

- LATAR BELAKANG
- MAKSUD DAN TUJUAN
- ASPEK STRATEGIS
- KONDISI UMUM SKPD
- SISTEMATIKA PENYUSUNAN LKIP

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

- RENSTRA 2016-2021
- PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2016

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

- PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- REALISASI ANGGARAN

#### **BAB IV PENUTUP**

#### **LAMPIRAN**

LAMPIRAN 1 : Perjanjian Kinerja

LAMPIRAN 2 : Matriks Renstra





## **BAB II**

### **PERENCANAAN KINERJA**

#### **A. RENCANA STRATEGIS 2016-2021**

Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 pada hakikatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui strategi dan kebijakan, agar tercapai sasaran dan tujuan secara efektif dan efisien.

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program pembangunan nasional, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan menetapkan rencana strategis tahun 2016 – 2021 sebagai dasar acuan dalam penyusunan kebijakan, program, dan kegiatan, serta sebagai pedoman dan pengendalian dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk menuju pada pencapaian visi, misi serta tujuan strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.

Komponen perencanaan strategis meliputi pernyataan visi, misi, tujuan dan sasaran, serta strategi pencapaian tujuan dan sasaran yang berupa kebijakan dan program kerja. Komponen-komponen perencanaan strategis tersebut telah dituangkan dalam dokumen Rencana Strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan melalui penetapan Peraturan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 32 Tahun 2010 tentang Rencana Strategis (Renstra) Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun Anggaran 2016-2021.

Komponen-komponen Rencana Strategis tersebut dapat diuraikan sebagai berikut :

### **Visi**

Visi adalah suatu gambaran jauh ke depan, kemana Kabupaten Balangan hendak di bawa. Gambaran ke depan tersebut dibangun melalui proses refleksi dan proyeksi yang digali dari nilai-nilai luhur yang dianut oleh seluruh komponen stake holder. Pernyataan Visi Bupati Balangan adalah :

***“Terwujudnya Kabupaten Balangan Yang Maju dan Sejahtera Melalui Pembangunan Sumber Daya Manusia”.***

Sajikan uraian secukupnya terhadap visi tsb. diatas dengan merujuk kepada RENSTRA Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.

### **Misi**

Misi adalah kristalisasi dari keinginan menyatukan langkah dan gerak untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan. Misi Bupati yang menjadi pegangan pelaksanaan tugas seluruh aparat Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan adalah :

Misi keenam : *Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah*

### **Tujuan dan Sasaran**

Berdasarkan visi dan misi di atas, Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan menetapkan tujuan strategis yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang ingin dicapai atau dihasilkan Pemerintah Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai 5 (lima) tahun kedepan. Sedangkan Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan yaitu sesuatu yang ingin dicapai atau

dihasilkan oleh instansi pemerintah untuk jangka waktu Jangka pendek ( satu tahun ) dalam rentang waktu masa Renstra. Adapun tujuan dan sasaran strategis untuk masing-masing **misi** , sebagai berikut :

1. Tujuan untuk misi Optimalisasi Pemberdayaan Aparatur Pemerintah Daerah adalah :

1.1 Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang semakin transparan, responsif dan akuntabel.

Sasaran :

1.1.1 Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

Sasaran :

1.1.2 Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.

### **Kebijakan dan Program**

Kebijakan dan program merupakan wujud operasionalisasi dari strategi, yaitu suatu cara mengelola risiko dengan memaksimalkan segala kekuatan dan menyembunyikan kelemahan untuk mengisi / memanfaatkan semua peluang dalam upaya mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan.

### **Kebijakan**

Kebijakan yang ditetapkan dalam Renstra Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan adalah :

1. Menyajikan laporan keuangan yang baik dan benar berdasarkan ketentuan perundangan yang berlaku.
2. Meningkatkan prosentase PAD terhadap Pendapatan Daerah dalam rangka menuju kemandirian APBD.

3. Mewujudkan integrasi dan sinkronisasi aplikasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian secara online untuk mewujudkan efisiensi, efektifitas serta transparansi.
4. Mewujudkan peningkatan dan pengembangan SDM melalui pendidikan dan pelatihan teknis.

### **Program**

Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

Program-program yang ditetapkan dalam rencana strategis Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan adalah sebagai berikut :

1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan
6. Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah
7. Program Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan

## B. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Perjanjian Kinerja Tahun 2017 merupakan komitmen seluruh unsur Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan untuk memenuhi target kinerja yang telah ditetapkan dan sebagai bagian dari upaya memenuhi misi organisasi. Dokumen ini memuat 7 **program** dengan 5 indikator kinerja sasaran. Program adalah rencana tindak jangka panjang yang secara sistematis mengarahkan seluruh aktivitas yang akan dilaksanakan ke arah tercapainya tujuan / sasaran.

Adapun uraian lebih lanjut dokumen tersebut adalah sebagai berikut :

Sasaran maupun target-target yang ingin dicapai pada tahun 2017 terkait dengan pelaksanaan program-program di Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan tersebut adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Nilai AKIP Badan Keuangan Daerah	Nilai AKIP Badan Keuangan Daerah	B
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan	WTP
3	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	4%
		Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan	6%
		Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat	40%
		Persentase Penghapusan, Pemusnahan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD	65%
		Persentasi SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Daerah	90%

Tabel 2. Perjanjian Kinerja Badan Keuangan Daerah Kab. Balangan TA. 2017

Sasaran Strategis yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan tertuang dalam RPJMD adalah :

**1. Sasaran :**

Meningkatnya kemandirian keuangan daerah

**1.1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- 1) Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
- 2) Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan
- 3) Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat

Sasaran Strategis yang lainnya merupakan sasaran strategis yang tertuang hanya di Indikator Kinerja Utama (IKU) Badan Keuangan Daerah.

**1. Sasaran :**

Nilai AKIP Badan Keuangan Daerah

**1.1 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1) Cakupan pelayanan administrasi perkantoran

**1.2 Program Pelayanan Administrasi Perkantoran**

- 1) Cakupan sarana kerja aparatur

**1.3 Program Peningkatan Disiplin Aparatur**

- 1) Persentase tingkat Disiplin Aparatur

**1.4 Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur**

- 1) Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur

**1.5 Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan**

### **Capaian Kinerja dan Keuangan**

- 1) Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan

#### **1.6 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- 1) Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan

### **2. Sasaran :**

Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah

#### **2.1 Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah**

- 1) Opini BPK terhadap Laporan Keuangan



### **BAB III**

## **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas diartikan sebagai kemampuan untuk menjawab atas mandat yang diberikan kepada pengemban amanat, sedangkan kinerja diartikan sebagai prestasi kerja pengemban amanat atas pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Sebagaimana dimaksud dalam **Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006** tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan **Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi** Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, laporan ini mengungkapkan capaian kinerja sasaran, keluaran dari masing-masing kegiatan, serta hasil (outcome) yang dicapai. Dalam tahun 2017 Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan melaksanakan 7 (tujuh) program dengan 68 (enam puluh delapan) kegiatan.

LKIP 2017 ini menyajikan pengukuran capaian indikator kinerja sasaran, output, dan hasil sebagaimana yang dituangkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Perjanjian indikator kinerja dan targetnya merupakan prasyarat mutlak agar mekanisme suatu pengukuran kinerja dapat diterapkan sehingga capaian kinerja suatu instansi dapat diketahui tingkat keberhasilannya.

Metode pengukuran kinerja yang digunakan adalah membandingkan antara rencana kinerja (*performance plan*) yang diinginkan dengan realisasi kinerja (*performance result*) yang telah dicapai. Dalam hal ini perbandingan tersebut dilakukan terhadap indikator kinerja, sebagaimana ditetapkan dalam **dokumen Perjanjian Kinerja**. Terhadap terjadinya celah kinerja (*performance gap*), dilakukan analisis penyebab terjadinya celah kinerja tersebut, serta tindakan-tindakan perbaikan apa yang diperlukan untuk meningkatkan kinerja di masa mendatang.

Dalam rangka **memberikan kesimpulan pengukuran kinerjanya**, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan menetapkan katagorisasi pencapaian kinerja berdasarkan capaian rata-rata atas indikator kinerja menjadi empat katagori sebagai berikut :

<b>Urutan</b>	<b>Rentang Capaian Kinerja</b>	<b>Katagori Capaian Kinerja</b>
I	91 % sampai dengan 100 %	Sangat Berhasil
II	81 % sampai dengan 90 %	Berhasil
III	71 % sampai dengan 80 %	Cukup Berhasil
IV	Kurang dari 71 %	Kurang Berhasil

Tabel 3. Katagorisasi Pencapaian Kinerja

## **A. PENCAPAIAN KINERJA ORGANISASI**

Sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja, Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan memiliki 3 (tiga) sasaran dan 7 (tujuh) program yang harus dilaksanakan. Dari 3 (tiga) sasaran yang telah ditetapkan tersebut, tingkat capaian kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan dapat diikhtisarkan bahwa 2 (dua) indikator kinerja sasaran berkategori **Berhasil**, yaitu sebagai berikut :

<b>No</b>	<b>Nama Sasaran</b>	<b>Penanggung Jawab</b>	<b>Rata-rata Capaian Kinerja (%)</b>	<b>Kategori Capaian</b>
1	Nilai AKIP Badan Keuangan Daerah	Sekretariat	94,83	Sangat Berhasil
2	Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah	Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan	96	Sangat Berhasil
3	Meningkatnya kemandirian keuangan daerah	Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Aset Daerah	116	Sangat Berhasil

Tabel 4. Indikator Kinerja Sasaran

Adapun rincian capaian kinerja atas **3 sasaran** dengan kategorinya adalah sebagai berikut :

**1****Sasaran :**

Nilai AKIP Badan Keuangan Daerah

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran terwujudnya peningkatan SDM yang berorientasi pada peningkatan disiplin dan tanggung jawab moral dalam melaksanakan tugas tersebut adalah Sekretariat Badan Keuangan Daerah. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Cakupan pelayanan administrasi perkantoran	%	100	96	96
2.	Cakupan sarana kerja aparatur	%	100	89	89
3.	Persentase tingkat Disiplin Aparatur	%	100	100	100
4.	Persentase Kapasitas Sumber Daya Aparatur	%	100	84	84
5.	Persentase Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	%	100	100	100
6.	Meningkatnya Kualitas Dokumen Perencanaan	%	100	100	100
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>94,83</b>

Tabel 5. Indikator Kinerja Sasaran Pertama

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Nilai AKIP Badan Keuangan Daerah adalah sebesar 94,83 % yang berarti masuk dalam katagori capaian Berhasil yang secara rinci dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target Realisasi		%
1	Persentase penyediaan jasa surat menyurat	%	100	100	100
2	Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik	bulan	12	12	100
3	Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	%	100	100	100
4	Terselenggaranya administrasi keuangan dan penatausahaan SKPD	bulan	12	12	100
5	Tersedianya jasa kebersihan kantor	OB	4	4	100
6	Tersedianya alat tulis kantor	%	100	100	100
7	Persentase terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan	%	100	55	55
8	Terpenuhinya penerangan bangunan kantor	%	100	98	98
9	Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor	jenis	2	2	100
10	Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	jenis	3	3	100
11	Terpenuhinya makanan dan minuman	kali	24	24	100
12	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	OK	40	40	100
13	Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dan konsultasi di dalam daerah	OK	36	32	89

14	Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional	bh	2	2	100
15	Jumlah pengadaan mebeleur	kursi	20	20	100
16	Jumlah pengadaan komputer	bh	5	5	100
17	Persentase terpeliharanya gedung kantor secara berkala (%)	%	100	97	97
18	Persentase terpeliharanya kendaraan dinas/operasional	%	100	59	59
19	Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	stell	130	130	100
20	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan	kecamatan	8	6	75
21	Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan	OK	14	13	93
22	Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	jenis	3	3	100
23	Tersusunnya Laporan keuangan semesteran	doc	1	1	100
24	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun	doc	1	1	100
25	Tersusunnya evaluasi kinerja dan keuangan	doc	1	1	100
26	Tersusunnya Renstra dan Renja SKPD	doc	2	2	100

Tabel 6. Indikator Kinerja Kegiatan Sekretariat

Uraian dari tabel diatas sebagai berikut :

**1. Indikator Kinerja Persentase penyediaan jasa surat menyurat.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyediaan jasa surat menyurat.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Persentase penyediaan jasa surat menyurat tersebut adalah sebesar 100 atau 100 %

dari targetnya yang sebesar 100. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 80%, maka terjadi peningkatan.

## **2. Indikator Kinerja Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terpenuhinya kebutuhan jasa komunikasi, air dan listrik tersebut adalah sebesar 12 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 12. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka tidak terjadi peningkatan / penurunan karena kegiatan tersebut merupakan kegiatan rutin.

## **3. Indikator Kinerja Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor tersebut adalah sebesar 99,7 atau 99,7 % dari targetnya yang sebesar 100. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 80 %, maka terjadi peningkatan.

#### **4. Indikator Kinerja Terselenggaranya administrasi keuangan dan penatausahaan SKPD**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyediaan jasa administrasi keuangan.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terselenggaranya administrasi keuangan dan penatausahaan SKPD tersebut adalah 12 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 12. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka tidak terjadi peningkatan / penurunan.

#### **5. Indikator Kinerja Tersedianya jasa kebersihan kantor**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyediaan jasa kebersihan kantor.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersedianya jasa kebersihan kantor tersebut adalah sebesar 4 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 4. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka tidak terjadi peningkatan / penurunan.

#### **6. Indikator Kinerja Tersedianya alat tulis kantor**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyediaan Alat Tulis Kantor.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersedianya alat tulis kantor tersebut adalah sebesar 100 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 100. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.



Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 90 % , maka terjadi kenaikan karena banyaknya alat tulis kantor yang digunakan.

#### **7. Indikator Kinerja Persentase terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyediaan barang cetakan dan penggandaan.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Persentase terpenuhinya keperluan barang cetakan dan penggandaan tersebut adalah sebesar 55 atau 55 % dari targetnya yang sebesar 100. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Kurang Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 60 % , maka terjadi penurunan karena masih adanya sisa persediaan cetak yang cukup.

#### **8. Indikator Kinerja Terpenuhinya penerangan bangunan kantor**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terpenuhinya penerangan bangunan kantor tersebut adalah sebesar 98,3 atau 98,3 % dari targetnya yang sebesar 100. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 70 % , maka terjadi peningkatan.

#### **9. Indikator Kinerja Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersedianya peralatan dan perlengkapan kantor tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka tidak terjadi peningkatan / penurunan.

#### **10. Indikator Kinerja Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terpenuhinya kebutuhan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka tidak terjadi peningkatan / penurunan.

#### **11. Indikator Kinerja Terpenuhinya makanan dan minuman**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyediaan makanan dan minuman.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terpenuhinya makanan dan minuman tersebut adalah sebesar 24 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 24. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Cukup Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 75 % , maka terjadi peningkatan.

**12. Indikator Kinerja Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dan konsultasi ke luar daerah**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dan konsultasi ke luar daerah tersebut adalah sebesar 40 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 40. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka tidak terjadi peningkatan / penurunan.

**13. Indikator Kinerja Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dan konsultasi di dalam daerah**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah orang yang mengikuti koordinasi dan konsultasi di dalam daerah tersebut adalah sebesar 32 atau 88,9 % dari targetnya yang sebesar 36. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 0 % , maka terjadi peningkatan.

**14. Indikator Kinerja Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Pengadaan kendaraan dinas/operasional.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah pengadaan kendaraan dinas/operasional tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Pada tahun 2016 kegiatan ini tidak ada dalam APBD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.

**15. Indikator Kinerja Jumlah pengadaan mebeleur**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Pengadaan Mebeleur.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah pengadaan mebeleur tersebut adalah sebesar 20 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 20. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100% , maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**16. Indikator Kinerja Jumlah pengadaan komputer**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Pengadaan Komputer.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah pengadaan komputer tersebut adalah sebesar 5 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 5. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Pada tahun 2016 kegiatan ini tidak ada dalam APBD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.

**17. Indikator Kinerja Persentase terpeliharanya gedung kantor secara berkala**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Persentase terpeliharanya gedung kantor secara berkala tersebut adalah sebesar 97 atau 97 % dari targetnya yang sebesar 100. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Cukup Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 80 % , maka terjadi peningkatan.

**18. Indikator Kinerja Persentase terpeliharanya kendaraan dinas/operasional**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Persentase terpeliharanya kendaraan dinas/operasional tersebut adalah sebesar 59,4 atau 59,4 % dari targetnya yang sebesar 100. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Kurang Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka terjadi penurunan.

**19. Indikator Kinerja Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya tersebut adalah sebesar 130 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 130. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**20. Indikator Kinerja Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan tersebut adalah sebesar 6 atau 75 % dari targetnya yang sebesar 8. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Cukup Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka terjadi penurunan.

#### **21.Indikator Kinerja Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Bimbingan teknis implementasi peraturan perundang-undangan.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah orang yang mengikuti bimtek implementasi perundang-undangan tersebut adalah sebesar 13 atau 92,9 % dari targetnya yang sebesar 14. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Kurang Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 0 % , maka terjadi peningkatan.

#### **22.Indikator Kinerja Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya Laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD tersebut adalah sebesar 3 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 3. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

### **23. Indikator Kinerja Tersusunnya Laporan keuangan semesteran**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan laporan keuangan semesteran.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya Laporan keuangan semesteran tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

### **24. Indikator Kinerja Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

### **25. Indikator Kinerja Tersusunnya evaluasi kinerja dan keuangan**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Evaluasi Kinerja dan Keuangan.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya evaluasi kinerja dan keuangan tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

## 26. Indikator Kinerja Tersusunnya Renstra dan Renja SKPD

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya Renstra dan Renja SKPD tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 % , maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**2**

**Sasaran :**

**Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah**

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah tersebut adalah Bidang Akuntansi dan Pertanggungjawaban, Bidang Anggaran, Bidang Perbendaharaan. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Opini BPK terhadap laporan Keuangan	WTP	WTP	-	-
Rata-rata capaian					-

Tabel 7. Indikator Kinerja Sasaran Kedua



Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintah daerah belum dapat mencantumkan realisasi dan capaian dari indikator kinerja sasaran karena masih dalam proses penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan. Namun untuk indikator kinerja output dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD	laporan	1	1	100
2	Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD	laporan	1	1	100
3	Tersusunnya Laporan Keuangan Semesteran SKPKD	laporan	2	2	100
4	Tersusunnya Laporan Realisasi Keuangan Triwulan SKPKD	laporan	2	2	100
5	Tersusunnya perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah	laporan	1	1	100
6	Tersusunnya kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah	%	100	82	82
7	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD TA 2018	doc	1	1	100
8	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD TA 2018	doc	3	3	100
9	Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD TA. 2017	doc	1	1	100
10	Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Perubahan APBD TA. 2017	doc	1	1	100
11	Tersedianya petunjuk pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	buku	1	1	100
12	Terselenggaranya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	kali	4	4	100

13	Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	org	154	138	90
14	Terlaksananya pelaksanaan pendampingan/asistensi penyusunan RKA Perubahan dan RKA Murni	kegiatan	2	2	100
15	Terlaksananya pendampingan/asistensi penyusunan DPA Perubahan dan DPA Murni	kegiatan	2	2	100
16	Tersusunnya Kebijakan Umum APBD	jenis doc	2	2	100
17	Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran	doc	2	2	100
18	Tersusunnya SPD dan kartu kendali kegiatan	SKPD	41	41	100
19	Persentase terlaksananya penyesuaian penentuan gaji ke 13 dan rapel gaji	%	100	91	91
20	Tersusunnya laporan realisasi DAU	%	100	99	99
21	Persentase terlaksananya evaluasi dan pemutahiran data gaji PNS	%	100	99	99
22	Tersusunnya perbup pedoman penyusunan APBD Murni dan Perubahan	doc	2	2	100
23	Tersusunnya peraturan KDH tentang penatausahaan pelaksanaan APBD Murni	doc	1	1	100
24	Terlaksananya Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	tahun	1	1	100
25	Terselenggaranya Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan	tahun	1	1	100

Tabel 8. Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Pertama

Uraian tabel diatas sebagai berikut :

**1. Indikator Kinerja Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**2. Indikator Kinerja Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Pertanggungjawaban APBD tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**3. Indikator Kinerja Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

#### **4. Indikator Kinerja Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan Triwulanan SKPKD.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Pelaporan Keuangan Akhir Tahun SKPKD tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

#### **5. Indikator Kinerja Tersusunnya perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**6. Indikator Kinerja Tersusunnya kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan Kebijakan dan Sistem Akuntansi Pemerintah Daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah tersebut adalah sebesar 82 atau 82 % dari targetnya yang sebesar 100. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100%, maka terjadi penurunan.

**7. Indikator Kinerja Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**8. Indikator Kinerja Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Balangan.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran APBD.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Balangan tersebut adalah sebesar 3 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 3. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka terjadi peningkatan/penurunan.

**9. Indikator Kinerja Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang Perubahan APBD.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2015 tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**10. Indikator Kinerja Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Perubahan APBD.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya Rancangan Peraturan Bupati Balangan tentang Penjabaran Perubahan APBD tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**11. Indikator Kinerja Tersedianya petunjuk pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang Penjabaran Perubahan APBD.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersedianya petunjuk pengelolaan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 50 %, maka terjadi peningkatan.

#### **12. Indikator Kinerja Terselenggaranya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terselenggaranya sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah sebesar 4 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 4. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 25 %, maka terjadi peningkatan.

#### **13. Indikator Kinerja Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terselenggaranya bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah tersebut adalah sebesar 138 atau 89,6 % dari targetnya yang sebesar 154. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 11,76 %, maka terjadi peningkatan.

**14. Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pelaksanaan pendampingan/asistensi penyusunan RKA Perubahan dan RKA Murni.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Pendampingan / Asistensi Penyusunan RKA.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah kegiatan pelaksanaan pendampingan/asistensi penyusunan RKA Perubahan dan RKA Murni tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**15. Indikator Kinerja Jumlah kegiatan pelaksanaan pendampingan/asistensi penyusunan DPA Perubahan dan DPA Murni.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Pendampingan / Asistensi Penyusunan DPA.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah kegiatan pelaksanaan pendampingan/asistensi penyusunan DPA Perubahan dan DPA Murni tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**16. Indikator Kinerja Tersusunnya Kebijakan Umum APBD.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan Kebijakan Umum APBD.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya Kebijakan Umum APBD tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.



Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

#### **17. Indikator Kinerja Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya Prioritas dan Plafon Anggaran tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

#### **18. Indikator Kinerja Tersusunnya SPD dan kartu kendali kegiatan.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Peningkatan manajemen keuangan daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya SPD dan kartu kendali kegiatan tersebut adalah sebesar 41 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 41. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

#### **19. Indikator Kinerja Persentase terlaksananya penyesuaian penentuan gaji ke 13 dan rapel gaji.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyesuaian penentuan gaji ke 13 dan rapel gaji.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Persentase terlaksananya penyesuaian penentuan gaji ke 13 dan rapel gaji tersebut adalah sebesar 100 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 100. Hal ini

berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

#### **20. Indikator Kinerja Tersusunnya laporan realisasi DAU.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan laporan realisasi DAU.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya laporan realisasi DAU tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

#### **21. Indikator Kinerja Persentase terlaksananya evaluasi dan pemutahiran data gaji PNS.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Evaluasi dan pemutakhiran data gaji PNS.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Persentase terlaksananya evaluasi dan pemutahiran data gaji PNS tersebut adalah sebesar 100 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 100. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

#### **22. Indikator Kinerja Tersusunnya perbup pedoman penyusunan APBD Murni dan Perubahan.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan petunjuk pelaksanaan manual keuangan daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya perbup pedoman penyusunan APBD Murni dan Perubahan tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

### **23. Indikator Kinerja Tersusunnya peraturan KDH tentang penatausahaan pelaksanaan APBD Murni.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan Peraturan Kepala Daerah Penunjang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya peraturan KDH tentang penatausahaan pelaksanaan APBD Murni tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

### **24. Indikator Kinerja Terlaksananya Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terlaksananya Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

## 25. Indikator Kinerja Terselenggaranya Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan.

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terselenggaranya Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**2**

**Sasaran :**

**Meningkatnya kemandirian keuangan daerah**

Penanggungjawab atas pencapaian sasaran Meningkatnya kemandirian keuangan daerah tersebut adalah Bidang Pendataan dan Penetapan, Bidang Penagihan dan Keberatan, Bidang Aset Daerah. Sasaran tersebut terumuskan dalam beberapa indikator kinerja sasaran dengan target dan realisasi pada tahun 2017 sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Sasaran / Outcome	Satuan	Target	Realisasi	%
1.	Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah	%	4	8	200
2.	Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan	%	6	10	167

	Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat	%	40	10,11	10,11
	Persentase Penghapusan, Pemusnahan, Pemanfaatan dan Pemindahtanganan BMD	%	65	60,6	93,23
	Persentasi SKPD yang menyampaikan Daftar Kebutuhan Barang Daerah	%	90	100	111
<b>Rata-rata capaian</b>					<b>116</b>

Tabel 9. Indikator Kinerja Sasaran Ketiga

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa rata-rata capaian indikator kinerja sasaran Meningkatnya kemandirian keuangan daerah adalah sebesar 116 % yang berarti masuk dalam katagori capaian Sangat Berhasil yang secara rinci dapat dijelaskan pada tabel sebagai berikut :

No	Indikator Kinerja Kegiatan (output)	Satuan	Target	Realisasi	%
1	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan PBB/BPHTB	%	100	75	75
2	Terlaksananya pemeriksaan, pengembalian dan pemusnahan barang	kali	1	1	100
3	Terlaksananya peningkatan SDM aparatur pengelolaan retribusi daerah	SKPD	18	18	100
4	Tersusunnya pendataan dan penilaian PBB P2	doc	8	8	100
5	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dan bukan PAD lainnya	bulan	12	12	100

6	Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi Penerimaan Pajak Daerah lainnya	bulan	12	12	100
7	Tersusunnya dokumen Penelitian dan verifikasi Pajak Daerah dan BPHTB	doc	1	1	100
8	Tersusunnya dokumen Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah	doc	1	1	100
9	Tersusunnya dokumen Evaluasi dan pengendalian Pajak Daerah	doc	1	1	100
10	Jumlah hasil monitoring dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah	doc	2	2	100
11	Tersusunnya data pengelolaan dan monitoring DBH Pajak, Non Pajak dan Dana Perimbangan Lainnya	doc	3	3	100
12	Tersusunnya data ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan dana bagi hasil provinsi dan pendapatan lainnya	laporan	4	4	100
13	Jumlah kegiatan Peningkatan Pengamanan Aset Daerah	kegiatan	2	1	50
14	Jumlah kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah	kegiatan	2	2	100
15	Terlaksananya Penghapusan dan pemindahtanganan aset/barang daerah	%	100	61	61
16	Tersusunnya Kebutuhan Barang Daerah	doc	1	1	100
17	Jumlah dokumen standar satuan harga	doc	1	1	100

Tabel 10. Indikator Kinerja Kegiatan Bidang Kedua

Uraian table diatas sebagai berikut :

**1. Indikator Kinerja Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan PBB/BPHTB.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Peningkatan Penerimaan PBB/BPHTB).

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan PBB/BPHTB tersebut adalah sebesar 74,9 atau 74,9 % dari targetnya yang sebesar 100. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka terjadi penurunan.

## **2. Indikator Kinerja Terlaksananya pemeriksaan, pengembalian dan pemusnahan barang kuasi.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Pemeriksaan, pengembalian dan pemusnahan barang kuasi.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terlaksananya pemeriksaan, pengembalian dan pemusnahan barang kuasi tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

## **3. Indikator Kinerja Terlaksananya peningkatan SDM aparatur pengelolaan retribusi daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Peningkatan SDM Aparatur Pengelola Retribusi Daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terlaksananya peningkatan SDM aparatur pengelolaan retribusi daerah tersebut adalah sebesar 18 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 18. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**4. Indikator Kinerja Tersusunnya pendataan dan penilaian PBB P2.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Pendataan dan Penilaian PBB P2.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya pendataan dan penilaian PBB P2 tersebut adalah sebesar 8 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 8. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**5. Indikator Kinerja Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dan bukan PAD lainnya.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Penerimaan Retribusi Daerah dan Bukan PAD Lainnya).

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan retribusi daerah dan bukan PAD lainnya tersebut adalah sebesar 12 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 12. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**6. Indikator Kinerja Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan pajak daerah lainnya.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Intensifikasi dan Ekstensifikasi Sumber-sumber Pendapatan Daerah (Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah Lainnya).

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terlaksananya kegiatan intensifikasi dan ekstensifikasi peningkatan penerimaan pajak daerah lainnya tersebut adalah sebesar 12 atau 100 %



dari targetnya yang sebesar 12. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

#### **7. Indikator Kinerja Tersusunnya dokumen Penelitian dan verifikasi Pajak Daerah dan BPHTB.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah dan BPHTB.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya dokumen Penelitian dan verifikasi Pajak Daerah dan BPHTB tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Pada tahun 2016 kegiatan ini tidak ada dalam APBD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.

#### **8. Indikator Kinerja Tersusunnya dokumen Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya dokumen Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Pada tahun 2016 kegiatan ini tidak ada dalam APBD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.

**9. Indikator Kinerja Tersusunnya dokumen Evaluasi dan pengendalian Pajak Daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Evaluasi dan Pengendalian Pajak Daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya dokumen Evaluasi dan pengendalian Pajak Daerah tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Pada tahun 2016 kegiatan ini tidak ada dalam APBD Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan.

**10. Indikator Kinerja Jumlah hasil monitoring dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peningkatan Pendapatan Daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah hasil monitoring dan evaluasi peningkatan pendapatan daerah tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**11. Indikator Kinerja Tersusunnya data pengelolaan dan monitoring DBH Pajak, Non Pajak dan Dana Perimbangan Lainnya.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Pengelolaan dan Monitoring DBH Pajak dan Non Pajak dan Dana Perimbangan Lainnya.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya data pengelolaan dan monitoring DBH Pajak, Non Pajak dan Dana Perimbangan Lainnya tersebut adalah sebesar 3 atau 100 % dari targetnya

yang sebesar 3. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan..

**12. Indikator Kinerja Tersusunnya data ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan dana bagi hasil provinsi dan pendapatan lainnya.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Ekstensifikasi dan Intensifikasi Peningkatan Pendapatan DBH Pajak Propinsi dan Pendapatan lain lain.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya data ekstensifikasi dan intensifikasi peningkatan dana bagi hasil provinsi dan pendapatan lainnya tersebut adalah sebesar 4 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 4. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**13.Indikator Kinerja Jumlah kegiatan Peningkatan Pengamanan Aset Daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Peningkatan Pengamanan Aset Daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah kegiatan Peningkatan Pengamanan Aset Daerah tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**14. Indikator Kinerja Jumlah kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Peningkatan manajemen aset/ barang daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah kegiatan peningkatan manajemen aset/barang daerah tersebut adalah sebesar 2 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 2. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

**15. Indikator Kinerja Terlaksananya Penghapusan dan pemindahtanganan aset/barang daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset/Barang Daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Terlaksananya Penghapusan dan pemindahtanganan aset/barang daerah tersebut adalah sebesar 60,6 atau 60,6 % dari targetnya yang sebesar 100. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Kurang Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 75 %, maka terjadi penurunan karena keterbatasan SDM dan waktu sehingga kegiatan ini tidak terlaksana sepenuhnya.

**16. Indikator Kinerja Tersusunnya Kebutuhan Barang Daerah.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Tersusunnya Kebutuhan Barang Daerah tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari

targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

#### **17. Indikator Kinerja Jumlah dokumen standar satuan harga.**

Indikator Kinerja ini digunakan untuk mengukur kegiatan Penyusunan analisa standar belanja.

Dapat dijelaskan bahwa realisasi capaian kinerja atas indikator Jumlah dokumen standar satuan harga tersebut adalah sebesar 1 atau 100 % dari targetnya yang sebesar 1. Hal ini berarti bahwa capaian indikator tersebut termasuk dalam katagori capaian **Sangat Berhasil**.

Apabila dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2016 yang sebesar 100 %, maka tidak terjadi peningkatan/penurunan.

Sasaran strategis yang ketiga ini, merupakan sasaran RPJM Kabupaten Balangan yang menjadi tanggungjawab Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan. Sasaran ini menjadi prioritas dari Badan Keuangan Daerah dan memiliki 3 (tiga) indikator kinerja, yaitu :

1. Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah
2. Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan
3. Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat

Pada indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah tingkat capaian kinerja sebesar 200% (dua kali lipat dari yang ditargetkan). Pada indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan tingkat capaian kinerja sebesar 167% (melebihi dari yang ditargetkan). Pada indikator Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat tingkat capaian kinerja sebesar 10,11%, masih dibawah yang ditargetkan.

Pada tahun 2016 realisasi indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah (PAD) terhadap Pendapatan Daerah sebesar 5%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 8%. Pada tahun 2016 realisasi indikator Rasio Pendapatan Asli Daerah terhadap Dana Perimbangan sebesar 5%, sedangkan pada tahun 2017 sebesar 10 %. Pada tahun 2017 realisasi indikator Persentase tanah milik pemerintah daerah Yang bersertifikat sebesar 10,11%.

## B. REALISASI ANGGARAN

Guna melaksanakan seluruh program dan kegiatan untuk mencapai sasaran yang diinginkan, Anggaran Belanja Langsung Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan tahun 2017 menganggarkan jumlah anggaran belanja langsung sebesar Rp 37.616.073.949,76.

Data Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan untuk tahun anggaran 2017 adalah tersaji sebagai berikut

:

Nama Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Capaian
	Rp	Rp	%
<b>Program Pelayanan Administrasi Perkantoran</b>			
Penyediaan jasa surat menyurat	2.250.000	2.250.000	100,00
Penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik	391.730.000	324.333.221	82,80
Penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor	145.000.000	121.518.000	83,81
Penyediaan jasa administrasi keuangan	835.644.000	691.588.000	82,76
Penyediaan jasa kebersihan kantor	61.475.000	48.475.000	78,85
Penyediaan Alat Tulis Kantor	94.064.100	90.000.000	95,68
Penyediaan barang cetakan dan penggandaan	12.178.000	6.725.000	55,22
Penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor	37.725.000	35.949.000	95,29
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	508.100.000	216.170.000	42,54

Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	12.560.000	5.900.000	46,97
Penyediaan makanan dan minuman	51.000.000	34.344.000	67,34
Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi ke luar daerah	728.243.800	589.828.753	80,99
Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi dalam Daerah	42.000.000	13.305.000	31,68
<b>Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur</b>			
Pengadaan kendaraan dinas/operasional	723.150.000	598.940.000	82,82
Pengadaan mebeleur	188.000.000	69.712.500	37,08
Pengadaan Komputer	80.300.000	77.000.000	95,89
Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	386.646.299	255.650.000	66,12
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	571.014.000	337.638.996	59,13
<b>Program Peningkatan Disiplin Aparatur</b>			
Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	352.250.000	348.166.000	98,84
<b>Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur</b>			
Sosialisasi peraturan perundang-undangan	269.264.100	165.502.100	61,46
Bimtek implementasi perundang-undangan	100.000.000	67.300.000	67,30
<b>Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan</b>			
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	239.585.400	175.691.400	73,33
Penyusunan pelaporan keuangan semesteran	20.800.000	20.800.000	100,00



Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	82.391.000	78.736.000	95,56
Evaluasi Kinerja dan Keuangan	243.300.000	83.405.000	34,28
<b>Program Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan Keuangan Daerah</b>			
Penyusunan standar satuan harga	130.165.100	108.787.200	83,58
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD	344.373.600	300.118.700	87,15
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran APBD	431.791.100	404.820.200	93,75
Penyusunan rancangan peraturan daerah tentang perubahan APBD	394.342.600	293.575.900	74,45
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran perubahan APBD	331.886.000	301.457.524	90,83
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	360.817.000	357.605.600	99,11
Penyusunan rancangan peraturan KDH tentang penjabaran pertanggung jawaban pelaksanaan APBD	369.390.000	366.289.200	99,16
Penyusunan sistem informasi pengelolaan keuangan daerah	239.700.000	176.643.498	73,69
Sosialisasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	685.890.100	385.549.600	56,21
Bimbingan teknis implementasi paket regulasi tentang pengelolaan keuangan daerah	1.215.000.000	1.011.637.487	83,26
Peningkatan manajemen aset/barang daerah	839.716.000	565.375.393	67,33
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Peningkatan Penerimaan PBB/BPHTB)	255.520.200	169.453.800	66,32
Monitoring & evaluasi peningkatan pendapatan daerah	212.000.000	169.381.590	79,90
Pendampingan/asistensi penyusunan RKA	67.427.200	65.932.000	97,78

Pendampingan/asistensi penyusunan DPA	59.525.000	23.937.498	40,21
Penyusunan Kebijakan Umum APBD	257.245.000	171.204.650	66,55
Penyusunan Prioritas dan Plafon Anggaran	269.275.000	135.216.743	50,22
Pemeriksaan, pengembalian & pemusnahan barang kuasi	23.889.000	22.189.000	92,88
Peningkatan manajemen keuangan daerah	158.576.500	66.536.700	41,96
Pengelolaan dan Monitoring DBH Pajak, Non Pajak dan Dana Perimbangan Lainnya	112.249.500	107.088.000	95,40
Ekstensifikasi dan Intensifikasi Peningkatan Pendapatan Dana Bagi Hasil Provinsi dan Pendapatan Lainnya	148.750.000	139.840.950	94,01
Penyesuaian penentuan gaji ke 13 dan rapel gaji	153.141.000	111.568.380	72,85
Penyusunan laporan realisasi DAU	161.743.000	156.856.573	96,98
Evaluasi & pemutakhiran data gaji PNS	159.865.500	126.366.300	79,05
Penyusunan petunjuk pelaksanaan manual keuangan daerah	353.240.000	230.514.566	65,26
Penyusunan peraturan KDH penunjang pengelolaan keuangan daerah	176.710.000	173.582.000	98,23
Penyusunan Pelaporan Keuangan Semesteran SKPKD	221.050.000	220.997.044	99,98
Penyusunan Pelaporan Realisasi Keuangan Triwulan SKPKD	157.675.000	154.089.300	97,73
Pemeliharaan Dan Pengembangan Aplikasi Pengelolaan Keuangan Daerah	145.240.000	127.808.050	88,00
Perencanaan Pelaksanaan Pertanggung Jawaban Keuangan Daerah	567.537.000	501.503.600	88,36
Pengelolaan dan Pelaporan Administrasi Dana Perimbangan	126.453.000	114.576.788	90,61

Penyusunan Kebutuhan Barang Daerah	105.700.000	80.733.287	76,38
Peningkatan Pengamanan Aset Daerah	271.092.400	219.455.787	80,95
Peningkatan SDM aparatur pengelola retribusi daerah	97.078.400	75.767.600	78,05
Pendataan dan Penilaian PBB P2	280.827.400	248.012.300	88,31
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Penerimaan retribusi daerah dan bukan PAD lainnya)	317.262.100	243.113.000	76,63
Intensifikasi dan Ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan daerah (Peningkatan Penerimaan Pajak Daerah lainnya)	439.835.000	313.421.401	71,26
Penghapusan dan pemindahtanganan aset/barang daerah	227.364.000	106.322.378	46,76
Penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah	85.436.600	60.349.600	70,64
Penelitian dan Verifikasi Pajak Daerah dan BPHTB	145.041.700	113.065.800	77,95
Penagihan dan Monitoring Pajak Daerah	211.034.400	158.160.400	74,95
Evaluasi dan Pengendalian Pajak Daerah	94.249.700	64.308.500	68,23
<b>Program Peningkatan Pemantauan dan Pelaksanaan Pembangunan</b>			
Penyusunan Dokumen Perencanaan	64.350.000	20.303.700	31,55
<b>TOTAL</b>	<b>17.648.125.799</b>	<b>13.422.445.557</b>	<b>76,06</b>

Tabel 11. Realisasi Belanja Langsung Badan Keuangan Daerah  
Kab. Balangan TA. 2017

Secara umum serapan dana kegiatan prioritas pada tahun 2017 cukup optimal karena hanya mencapai 76,06 %, hal tersebut disebabkan belum

terlaksananya kegiatan sesuai dengan yang direncanakan karena berbagai kendala seperti masih terbatasnya kondisi sumber daya manusia yang ada maupun terkendala waktu pelaksanaan kegiatan-kegiatan serta berbagai kendala lainnya.



## **BAB IV**

### **PENUTUP**

---

#### **A. SIMPULAN**

---

Laporan Kinerja Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan tahun anggaran 2017 ini merupakan bagian dari laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Rencana Strategik Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2016 – 2021 yang tertuang dalam Peraturan Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 45 Tahun 2010. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dimaksudkan untuk mengetahui sejauh mana pencapaian Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran melalui pelaksanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2017 dalam rangka peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Tingkat capaian kinerja yang harus dipertanggungjawabkan oleh Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan sebagaimana ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2017 adalah 3 (tiga) indikator kinerja sasaran berkategori **Berhasil**.

Namun demikian kami menyadari bahwa dengan tingkat capaian tersebut di atas masih terdapat beberapa hal yang memerlukan penyempurnaan lebih lanjut di tahun mendatang. Kita semua berharap LKIP ini dapat dijadikan sebagai acuan bagi peningkatan kinerja di masa yang akan datang, serta dapat dijadikan bahan masukan (umpan balik) bagi perumusan strategi pencapaian sasaran yang lebih baik pada masa yang akan datang.

## **B. STRATEGI PENINGKATAN KINERJA**

---

Secara ringkas keseluruhan capaian kinerja tersebut di atas, baik yang berhasil maupun yang masih belum berhasil, telah memberikan masukan yang sangat berharga untuk peningkatan kinerja di masa mendatang. Sesuai hasil analisis capaian kinerja pada Tahun 2017, dapat dirumuskan beberapa langkah penting sebagai strategi pemecahan masalah yang akan dijadikan masukan atau sebagai bahan pertimbangan bagi Badan Keuangan Daerah Kabupaten Balangan pada Tahun Anggaran 2017, yaitu Perlunya dirumuskan atau direncanakan sistem satu pintu / *one gate system* dari perencanaan sampai kepada pertanggungjawaban keuangan daerah dengan penggunaan sistem informasi keuangan daerah berbasis komputerisasi sehingga meningkatkan efisiensi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.

Dalam pengelolaan aset daerah dilakukan rekonsiliasi data dengan semua SKPD yang bersumber dari data LRA masing-masing SKPD dan dilakukan verifikasi bagi aset yang telah tercatat, dan perlunya peningkatan kemampuan sumber daya aparatur pengelola aset daerah di SKPD-SKPD, untuk inventarisasi aset tanah dilaksanakan bertahap dengan skala prioritas.